

ABSTRACT

PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS PEKERJA DI PROVINSI LAMPUNG

By

DEA PITRI DAYANTI

This research analyzes the influence of district/city minimum wages (LOGUMK), education level (EDUC), and gross regional domestic product (LOGPDRB) on changes in worker status in Lampung Province using time series data for the 2021-2022 period from the Central Statistics Agency (BPS) and related sources, using the Vector Autoregression (VAR) method. The research results show that the level of education has a positive and significant effect, indicating that increasing education encourages labor mobility towards jobs with better status, especially in the formal sector. On the other hand, district/city minimum wages and gross regional domestic product do not have a significant effect, indicating that wage and economic growth policies have not been effective in improving the employment structure. These findings emphasize the importance of improving the quality of human resources as a key factor, so policies are recommended that prioritize quality and equitable access to education, strengthening the link between education and labor market needs (link and match), as well as developing training and internship programs to accelerate the absorption of formal labor.

Keywords: District/City Minimum Wage, Education, Worker Status, GRDP, VAR, Labor Market.

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS PEKERJA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DEA PITRI DAYANTI

Penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota (LOGUMK), tingkat pendidikan (EDUC), dan produk domestik regional bruto (LOGPDRB) terhadap perubahan status pekerja di Provinsi Lampung menggunakan data time series periode 2021-2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terkait, dengan metode *Vector Autoregression* (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa peningkatan pendidikan mendorong mobilitas tenaga kerja menuju pekerjaan dengan status lebih baik, khususnya di sektor formal. Sebaliknya, upah minimum kabupaten/kota dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa kebijakan pengupahan dan pertumbuhan ekonomi belum efektif memperbaiki struktur ketenagakerjaan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci, sehingga direkomendasikan kebijakan yang memprioritaskan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, penguatan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja (*link and match*), serta pengembangan program pelatihan dan magang untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja formal.

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan, Status Pekerja, PDRB, VAR, Pasar Tenaga Kerja.